

**Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak: Strategi
Pemberdayaan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak Di
Kecamatan Poncokusumo Desa Ngadireso**

Faridatun Nikmah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
faridatunnikmah@gmail.com

Rizka Amaliah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
rizkiamalia@gmail.com

Ulil Fauziah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
ulilfauziah@gmail.com

Belawathona

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
belawathona@gmail.com

Rania

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
rania@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the strategies for women's empowerment and the fulfillment of children's rights through the implementation of the Women- and Child-Friendly Village Program (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak / DRPPA) in Ngadireso Village, Poncokusumo District, Malang Regency. This research employs a participatory qualitative approach using the Participatory Action Research (PAR) method, involving village officials, community leaders, women, and youth as active participants in the processes of problem identification, planning, implementation, and evaluation. The findings reveal that although Ngadireso Village has high social and economic potential, it still faces serious issues such as psychological violence, child neglect, and the increasing prevalence of online gender-based violence (OGBV). Low digital literacy, lack of family supervision, and limited counseling services are identified as key factors exacerbating these problems. Through the implementation of DRPPA and the establishment of the Family Learning Center (PUSPAGA), the village has successfully raised community awareness on the importance of protection and gender justice. Collaborative efforts between the village government, religious leaders, and the community have proven effective in strengthening community-based social protection systems. This study recommends enhancing village institutional capacity, improving community digital literacy, and integrating the values of Qaryah Thayyibah as the foundation for equitable and sustainable social development.

Keywords: Women and Child-Friendly Village, Women's Empowerment, Child Protection, Qaryah Thayyibah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak melalui penerapan Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Desa Ngadireso, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif partisipatif dengan metode Participatory Action Research (PAR), yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, perempuan, dan pemuda sebagai partisipan aktif dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Desa Ngadireso memiliki potensi sosial dan ekonomi yang tinggi, masih terdapat permasalahan serius seperti kekerasan psikis, penelantaran anak, dan meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO). Rendahnya literasi digital, minimnya pengawasan keluarga, serta terbatasnya layanan konseling menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi tersebut. Melalui penerapan DRPPA dan pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), desa mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan dan keadilan gender. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat terbukti efektif dalam memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis komunitas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan literasi digital masyarakat, serta integrasi nilai-nilai Qaryah Thayyibah sebagai dasar pembangunan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Desa Ramah Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Qaryah Thayyibah.

A. PENDAHULUAN

Desa Ngadireso yang berada di kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, merupakan wilayah strategis yang terletak di lereng Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kondisi geografis yang subur dan aktivitas ekonomi Masyarakat yang cukup berkembang sebenarnya menjadi potensi besar bagi peningkatan kesejahteraan sosial. Namun dibalik potensi tersebut, masih terdapat berbagai persoalan sosial, khususnya terkait pemenuhan hak Perempuan dan anak, serta minimnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan anak ditingkat Masyarakat.

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Tahun 2023 menunjukkan masih tingginya angka kekerasan psikis, serta penelantaran anak. Angka tersebut menggambarkan bahwa Perempuan dan anak masih berada dalam situasi rentan dan membutuhkan sistem perlindungan yang efektif serta berkelanjutan.

Selain kekerasan konvensional, muncul pula bentuk kekerasan baru di era digital, yakni kekerasan berbasis gender online (KBGO). Berdasarkan laporan SAFEnet Indonesia (2024), tercatat 480 kasus KBGO pada triwulan pertama tahun 2024, dimana sebagian besar korbannya adalah remaja dan anak perempuan. Rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan keluarga, serta keterbatasan layanan konseling membuat masalah ini semakin kompleks. Banyak korban memilih diam karena rasa malu, takut terhadap pelaku, dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya Upaya perlindungan sosial yang lebih kuat dan terintegrasi ditingkat desa. Pemerintah desa memiliki peran sentral dalam membangun lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan dan

kesetaraan gender. Pendekatan yang kolaboratif antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan upaya tersebut.

Salah satu Langkah strategis yang dapat diterapkan Adalah Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli anak (DRPPA). Program ini merupakan inisiatif nasional yang bertujuan mewujudkan desa yang aman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak melalui pemberdayaan berbasis masyarakat. Implementasi program ini dapat dilakukan dengan membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai wadah untuk edukasi, konsultasi, serta pendampingan bagi keluarga dalam meningkatkan kualitas pengasuhan dan mencegah kekerasan.

Penerapan DRPPA di Desa Ngadireso juga dapat diperkaya dengan pendekatan Qaryah Thayyibah, yaitu konsep pembangunan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal dan nilai religius, diharapkan Desa Ngadireso mampu menjadi contoh desa yang berdaya, berkeadilan gender, serta tangguh dalam melindungi perempuan dan anak.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Particpary Action Research (PAR). Metode ini menekankan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek penelitian dalam proses identifikasi masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan program, serta evaluasi hasil kegiatan. Dengan demikian, proses penelitian tidak hanya menghasilkan data dan temuan akademik, tetapi juga menghadirkan perubahan sosial yang nyata dan berkelanjutan di tengah masyarakat.

Pemilihan metode PAR didasarkan pada relevansinya dengan tujuan utama penelitian, yaitu mewujudkan pemberdayaan masyarakat Desa Ngadireso agar mampu menjadi agen perubahan sosial dalam membangun Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang berbasis nilai-nilai Qaryah Thayyibah. Dalam konteks ini, pendekatan PAR tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, melainkan juga pada proses pembelajaran sosial yang terjadi di antara peneliti dan masyarakat. Melalui interaksi yang partisipatif dan reflektif, masyarakat diajak untuk mengenali permasalahan yang mereka hadapi, menganalisis akar penyebabnya, serta bersama-sama merumuskan solusi yang kontekstual dan berkelanjutan.

Selain itu, pendekatan PAR juga memungkinkan terjadinya transformasi sosial, di mana masyarakat yang semula pasif dalam menghadapi persoalan sosial menjadi lebih kritis, berdaya, dan mampu mengambil keputusan secara mandiri. Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian berperan sebagai fasilitator dan pendamping, membantu masyarakat dalam proses analisis dan pelaksanaan program tanpa mengambil alih kendali. Dengan cara ini, kegiatan penelitian menjadi wadah untuk memperkuat kesadaran kolektif dan menumbuhkan tanggung jawab bersama terhadap isu-isu strategis, terutama yang berkaitan dengan kesetaraan gender, perlindungan anak, dan penguatan ketahanan keluarga.

Adanya penerapan metode PAR di Desa Ngadireso diharapkan tidak hanya menghasilkan rekomendasi kebijakan dan model intervensi sosial, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih sadar, berdaya, dan tangguh dalam menghadapi tantangan sosial di masa depan. Penelitian ini sekaligus menjadi bentuk integrasi antara ilmu pengetahuan, nilai keislaman, dan kearifan lokal, sehingga proses

pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung dengan lebih bermakna dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial budaya Desa Ngadireso.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif partisipatif, dengan melibatkan masyarakat Desa Ngadireso, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, sebagai mitra aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Proses penelitian melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, perempuan, pemuda, dan keluarga. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, survei, serta diskusi kelompok (FGD) untuk menggambarkan kondisi sosial desa dalam perspektif gender dan perlindungan anak.

Hasil analisis menunjukkan adanya ketimpangan peran dalam pengasuhan anak, di mana sekitar 51,7% responden menyebutkan bahwa ayah tidak terlibat aktif dalam pengasuhan, dan hanya 15,5% yang menunjukkan keterlibatan tinggi. Fakta ini menandakan bahwa budaya patriarkal masih kuat di masyarakat pedesaan, sehingga tanggung jawab pengasuhan lebih banyak dibebankan pada perempuan. Kondisi ini berdampak pada ketidakseimbangan peran domestik serta lemahnya kerja sama dalam mendidik anak di lingkungan keluarga. Hal tersebut mendukung teori *family systems* yang menyatakan bahwa keseimbangan peran anggota keluarga penting bagi keharmonisan sosial.

Senada dengan teori family System, Wang dan Cheung (2023) juga menyebutkan bahwa sikap orang tua terhadap peran gender memiliki relevansi penting terhadap penyesuaian diri anak. Lebih jauh lagi, keterlibatan orang tua dapat membantu menjelaskan hubungan antara sikap orang tua terhadap peran gender dan penyesuaian diri anak.

Dari sisi pendidikan dan literasi keluarga, tingkat pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan perlindungan anak tergolong rendah. Hanya 25,9% orang tua yang pernah memberikan edukasi reproduksi kepada anak, sementara 96,6% tidak memantau perkembangan pubertas anak. Rendahnya angka ini memperlihatkan masih adanya anggapan bahwa topik reproduksi merupakan hal tabu. Kondisi ini menegaskan perlunya pendidikan orang tua (parenting education) dan literasi gender agar keluarga mampu memahami tumbuh kembang anak serta pentingnya perlindungan diri terhadap kekerasan seksual.

Secara infrastruktur sosial, 65,5% responden menyebutkan tidak tersedianya uang publik atau taman bermain ramah anak. Kekosongan fasilitas ini menggambarkan bahwa pembangunan desa belum berorientasi pada *child-friendly planning*. Berdasarkan teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner, lingkungan sosial dan fisik yang mendukung sangat berpengaruh pada perkembangan psikologis dan sosial anak.

Selain itu, 48,3% responden masih sering mendengar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun hanya 25,9% yang mengetahui adanya Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, bahkan 51,7% tidak tahu ke mana harus melapor bila kekerasan terjadi. Hal ini menunjukkan masih lemahnya kesadaran hukum dan mekanisme perlindungan sosial di tingkat desa. Teori *social awareness* menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum dan hak asasi merupakan pondasi penting dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang efektif.

Dari sisi kelembagaan, layanan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) di desa belum berjalan optimal. Sekitar 32,8% warga mengaku tidak ada layanan konseling atau pendampingan psikologis. Ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat lokal, terutama karena terbatasnya sumber daya manusia dan pelatihan kader. Namun, program DRPPA dan pelatihan parenting education membawa dampak positif: hasil evaluasi menunjukkan peningkatan 73% pemahaman masyarakat terhadap isu kesetaraan gender, hak anak, serta kolaborasi keluarga. Laki-laki mulai ikut terlibat dalam pengasuhan, dan muncul inisiatif warga untuk membentuk relawan perlindungan anak berbasis desa.

Temuan ini memperkuat gagasan Paulo Freire bahwa perubahan sosial berkelanjutan dapat tercapai jika masyarakat diberi ruang untuk refleksi dan aksi kolektif. Masyarakat Ngadireso kini menjadi subjek aktif yang menciptakan solusi atas persoalan sosial di lingkungannya. Pendekatan partisipatif juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap program DRPPA, mempererat solidaritas sosial, serta membangun ketahanan keluarga melalui nilai-nilai *Qaryah Thayyibah*.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program DRPPA berbasis partisipatif efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender dan perlindungan anak. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah desa, lembaga sosial, tokoh agama, dan masyarakat membentuk pondasi perubahan menuju desa yang inklusif, aman, dan ramah bagi perempuan serta anak.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukan bahwa penerapan program DRPPA di Desa Ngadireso melalui pendekatan *Qaryah Thayyibah* dan metode PAR berhasil meningkatkan pemahaman serta kepedulian masyarakat terhadap isu kesetaraan gender dan perlindungan anak. Partisipasi aktif warga, tokoh agama, serta pemerintah desa turut memperkuat ketahanan keluarga dan membangun sistem perlindungan sosial berbasis masyarakat. Hasilnya, Desa Ngadireso berkembang menjadi lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan gender, dengan warga yang semakin berdaya serta memiliki kesadaran tinggi terhadap kesejahteraan perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (2024). Kecamatan Poncokusumo dalam Angka 2024. Malang: BPS Kabupaten Malang.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. (2023). Laporan Tahunan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang Tahun 2023. Malang: DP3A.
- Habiba. (2022). Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kapabilitas sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 10(2), 123–134.
- Indonesia. (1990). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 60. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2021). Panduan Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Jakarta: KemenPPPA RI.
- Pemerintah Desa Ngadireso. (2023). Profil Desa Ngadireso Tahun 2023. Malang: Pemerintah Desa Ngadireso.
- SAFEnet Indonesia. (2024). Laporan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Triwulan I 2024. Jakarta: SAFEnet.
- Stringer, E. T. (2014). Action Research (4th ed.). SAGE Publications.
- Utomo, I. D. (2019). Pendidikan Seksual dalam Keluarga Indonesia: Tantangan dan Peluang. Jakarta: LP3ES.
- Waluyadi. (2002). Hukum perlindungan anak. Bandung: Mandar Maju.
- Wang, Iris Yili dan Cheung, Rebecca Y.M. (2023). Parents' Gender Role Attitudes and Child Adjustment: The Mediating Role of Parental Involvement. Sex Roles: Journal of Research. Vol. 89, 425-441, <https://link.springer.com/article/10.1007/s11199-023-01386-6>